

EKSPLANASI PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN ERA INDUSTRI 5.0

Nuril Laila Maghfuroh¹, Ariza Qanita², Muhtadi Ridwan³, Khusnudin⁴

Email: 220504220014@student.uin-malang.ac.id¹, 220504220005@student.uin-malang.ac.id², muhtadi@uin-malang.ac.id³, khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id⁴

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2,3,4}

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang perkembangan ekonomi Bani Umayyah dan ekonomi era industri 5.0. Munculnya gagasan revolusi industri 5.0 turut menjadi tantangan bagi sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam masih dianggap sebagai sistem ekonomi yang tidak fleksibel karena dibatasi oleh nilai agama. Padahal sistem ekonomi Islam sudah berhasil diterapkan pada masa kekuasaan kerajaan Islam terdahulu seperti Dinasti Bani Umayyah. Jenis penelitian ini adalah library reseach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku dan artikel jurnal dengan tema terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ekonomi welfare state pada masa Dinasti Bani Umayyah dapat diterapkan untuk menghadapi era revolusi industri 5.0. Konsep welfare state menekankan pada tiga prinsip dasar yaitu persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan dan tanggung jawab publik. Tiga prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip dalam sistem ekonomi Islam.

Kata kunci: Ekonomi, Era Bani Umayyah, Era Industri 5.0.

Abstract: This article examines the economic development of the Umayyads and the economy of the industrial era 5.0. The emergence of the idea of industrial revolution 5.0 has also become a challenge for the Islamic economic system. The Islamic economic system is still considered an inflexible economic system because it is limited by religious values. In fact, the Islamic economic system was successfully implemented during the reign of previous Islamic kingdoms such as the Umayyad Dynasty. This type of research is library research. The data used is secondary data in the form of books and journal articles with related themes. The research results show that the economic concept of the welfare state during the Umayyad Dynasty can be applied to face the era of industrial revolution 5.0. The welfare state concept emphasizes three basic principles, namely equality of opportunity, equal distribution of income and public responsibility. These three principles are in accordance with the principles of the Islamic economic system.

Keywords: Economy, Umayyah Era, Industrial Age 5.0.

PENDAHULUAN

Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia sejak agama tersebut diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, tampuk kepemimpinan Islam kemudian dilanjutkan oleh keempat Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berakhirnya kekuasaan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menjadi awal bagi terbentuknya sebuah sistem pemerintahan baru bercorak monarki absolut atau kerajaan turun temurun sehingga terbentuklah Dinasti Bani Umayyah.

Dinasti Umayyah diambil dari penisbatan nama Umayyah bin Abd. Syams bin Abdu Manaf. Ia merupakan salah seorang tokoh yang penting dalam masyarakat Quraisy pada zaman jahiliyah. Pendiri Bani Umayyah dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb (Saprida, 2021). Para sejarawan menyebut masa kerajaan Islam itu sebagai *"The Golden Age"* (Klasik, 2021).

Masa Bani Umayyah dikenal sebagai suatu pemerintahan zaman agresif. Hal ini dikarenakan perhatiannya terfokus pada persoalan perluasan wilayah kekuasaan dan penaklukan yang sempat terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin (Saprida, 2021). Walaupun Bani

Umayyah terbilang sukses mencatat kejayaan yang telah diraih, namun ternyata kejayaan tersebut tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena kelemahan-kelemahan internal yang tidak seimbang dengan semakin banyaknya tekanan dari pihak luar. Gaya hidup mewah yang diterapkan di lingkungan istana membuat anak-anak khalifah tidak mampu mengemban tugas berat kenegaraan pada saat mereka mewarisi kekuasaan. Selain itu, sejumlah golongan rakyat biasa merasa kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama yang sangat minim (Saprida, 2021).

Sektor ekonomi pada masa Bani Umayyah sudah berkembang. Hal itu ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir yang menghasilkan banyak karya dalam bidang ekonomi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa antara pemikiran ekonom muslim klasik dan kontemporer memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut berkisar pada pemikiran moneter dan fiskal. Secara garis besar, semua hasil pemikiran para cendekiawan muslim disesuaikan dengan perkembangan zamannya (Rinawati & Basuki, 2020).

Sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa ekonomi Islam dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi kontemporer. Sumber pemikiran dalam

sistem ekonomi Islam adalah akidah dan ideologi Islam dengan landasan al-Qur'an dan Hadis (Effendi, 2019). Sistem ekonomi Islam juga harus adaptif dengan perubahan seperti berkembangnya industri 5.0.

Dalam rangka menyambut era industri 5.0 yang sudah banyak digaungkan di berbagai negara, para ekonom muslim juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan konsep ekonomi Islam itu sendiri (Fajar, 2021). Terlebih lagi sistem ekonomi Islam dianggap dapat menampilkan keseimbangan dan keadilan serta memberikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan (Setiawan, 2020).

Penelitian dari Imama Zuhroh yang berjudul "Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah" memberikan gambaran terkait kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan di era Bani Umayyah adalah kebijakan untuk fokus pada internal (tidak memperluas daerah kekuasaan), egaliter, penjagaan harta umat, serta efisiensi waktu dan tenaga (Zuchroh, 2023). Penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut karena tidak hanya memotret capaian keberhasilan ekonomi namun juga mengkorelasikan kebijakan masa Bani

Umayyah untuk menghadapi tantangan revolusi industri 5.0.

Terdapat pula penelitian sejenis dari Muhammad Haris Hidayatullah dan Khusnuddin tentang "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang." Penelitian tersebut membangun korelasi kebijakan ekonomi masa lalu yang dapat diimplementasikan pada masa kini. Namun penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dari penelitian ini. Hasil dari penelitian menemukan bahwa relevansi yang ada pada masa khalifah dengan masa sekarang adalah terkait masalah zakat dan al-Kharaj (pajak) (2023). Sedangkan penelitian ini secara spesifik menekankan korelasinya pada revolusi industri 5.0.

Tulisan ini mengkaji tentang perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah dan meninjau relevansinya dengan perkembangan ekonomi era industri 5.0. Hal ini menjadi letak perbedaan dari penelitian-penelitian yang ditemukan sebelumnya. Kemajuan pada masa keemasan Islam patut dijadikan teladan, sehingga faktor-faktor yang mendorong kejayaan pada masa itu dapat diterapkan pada masa sekarang. Terlebih lagi pada masa itu sudah banyak pemikiran ekonomi Islam yang bisa diadaptasi dalam perkembangan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur bertujuan untuk menganalisis, menguraikan, dan merumuskan serta membandingkan telaah yang lebih kritis. Literatur yang digunakan pada penelitian ini sebanyak lima belas artikel dengan kata kunci perekonomian masa Bani Umayyah dan enam artikel, serta satu buku yang diambil dari *google book* dengan kata kunci revolusi industri 5.0 pada ekonomi Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencarian pada *google scholar* dengan fokus terbitan tahun 2023 dan berupa artikel jurnal. Hasil pencarian direduksi, diidentifikasi dan diambil literatur yang sesuai dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Masa Bani Umayyah

Bani Umayyah adalah sistem kekhilafahan yang terbentuk pertama kali setelah era Khulafaur Rasyidin (Zainudin, 2015). Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam yang berada dibawah kekuasaan keluarga Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun sejak 661-750 M. Pendiri sekaligus khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan.

Terbentuk Dinasti Bani Umayyah dimulai ketika terjadinya perang *Shiffin* antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peperangan tersebut berakhir dengan *tahkim* atau arbitrase yang memposisikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemenang. Sejak saat itulah kekuasaan Bani Umayyah tercatat dalam sejarah umat Islam. Pusat pemerintahan Bani Umayyah terletak di Damaskus. Selama masa pemerintahannya, terdapat 14 khalifah yang pernah berkuasa.

Terdapat lima khalifah yang terkenal pada masa itu dan dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Hisyam bin Abdul Malik. Puncak kejayaan Bani Umayyah terjadi pada masa pemerintahan dua khalifah yaitu Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz.

Pada masa itu banyak dibangun fasilitas publik, keamanan yang stabil dan pembangunan ekonomi yang pesat. Terdapat beberapa kebijakan yang membawa pengaruh besar pada masa kedua khalifah tersebut.

1. Al-Walid bin Abdul Malik

Pada masa kekuasaannya, Al-Walid bin Abdul Malik dikenal dengan kebijakan membangun fasilitas publik. Khalifah memerintah perbaikan dan

pembangunan jalan raya untuk memudahkan mobilitas menuju ke negerinya. Selain itu beliau juga mengeluarkan perintah untuk menggali sumur dan membuat kran sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh para pekerja, jamaah yang beribadah dan masyarakat umum.

Fasilitas publik lainnya yang juga dibangun oleh khalifah Al-Walid adalah rumah sakit (Bimaristan al-Nuri). Rumah sakit tersebut dibangun dengan kas negara dan masyarakat diberikan layanan pengobatan secara gratis. Rumah sakit tersebut dibangun sekitar tahun 706 M. Pada masa itu terdapat penyakit kusta dan lepra yang sudah menjadi endemik dan butuh penanganan serius. Khalifah meminta dokter untuk mengisolasi pasien kusta dan lepra pada ruangan khusus. Infrastruktur lainnya yang juga dibangun pada masa Al-Walid adalah masjid, pabrik, gedung, dan panti asuhan.

2. Umar bin Abdul Aziz

Pada masa dinasti Bani Umayyah, khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep *welfare state* yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk mengubah taraf hidup masyarakat, salah satu buktinya yaitu seluruh masyarakat pada saat itu tidak ditemukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena berkecukupan

(Ghozali, 2019). Salah satu kebijakannya yang membawa pengaruh besar adalah pengelolaan dana jizyah. Umar menerapkan pengurangan beban jizyah atas pengikut agama kristen. Bahkan lebih lanjut, Umar juga menghapus kewajiban pembayaran jizyah secara menyeluruh. Rakyat tidak perlu lagi membayar jizyah namun para pemimpin tetap wajib memperhatikan rakyatnya.

Pada saat itu khalifah sudah mempunyai kesadaran terkait pentingnya pembangunan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong perekonomian daerah. Khalifah Umar juga menerapkan sistem ekonomi bebas yang menekankan agar para pejabat tidak terlalu ikut campur dalam kebijakan harga. Hal ini mendorong terciptanya pasar yang sehat dan semua keputusan dibuat oleh pelaku pasar. Meski dikatakan sebagai ekonomi bebas, namun pemerintah tetap memberikan batasan bahwa transaksi ekonomi yang dilakukan tidak boleh menyalahi aturan syariat (Humaira et al., 2023).

Khalifah Umar juga menerapkan kebijakan pengelolaan lahan mati, memberikan konsep penyuburan tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan, dan menerapkan konsep kerjasama. Umar bin Abdul Aziz juga membatasi dan menghentikan aktivitas

penaklukan wilayah untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan untuk mengenalkan Islam secara lebih baik pada masyarakat. Hal tersebut berdampak baik yang ditunjukkan dari adanya kalangan masyarakat yang lebih tertarik masuk Islam karena sosok pemimpin yang baik dan tanpa ada paksaan.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih berfokus pada pembangunan dalam negeri. Khalifah berpendapat bahwa membenahi negara Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat lebih baik dari pada ambisi memperluas wilayah kekuasaan. Sementara itu, beliau tetap menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan kebebasan beragama bagi pemeluk kepercayaan lain. Beliau memberikan perlindungan dan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakangnya (Hariyanti & Mawardi, 2023).

Secara umum, sumber penerimaan negara pada masa Dinasti Bani Umayyah terbagi menjadi dua yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri dari seperlima *ghanimah* (harta rampasan perang), zakat, *jiyah* (pajak perlindungan bagi non muslim), *kharaj* (pajak tanah), *usyur* (bea masuk barang), pajak pasar, pajak penjualan rumah yang dikenakan pada penjual, pajak warisan dan pajak perikanan. Sementara

penerimaan bukan pajak terdiri dari *fa'i* (harta rampasan perang yang musuhnya menyerah tanpa peperangan), tanah *safawi* (tanah non muslim yang telah ditinggalkan dan atau meninggal), pendapatan sektor bisnis publik (negara mempunyai usaha bisnis) (Suherli et al., 2023).

Sementara itu, runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah terjadi pada masa Abu Malik bin Marwan atau Marwan II. Hal tersebut dipicu karena khalifah menerapkan kembali pajak kepada non muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan (Rofiqo & Rizal, 2019). Kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah juga disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya (Zainudin, 2015):

1. Konflik internal
 - a. Perang saudara di kalangan keluarga Bani Umayyah karena memperebutkan kekuasaan telah menurunkan wibawa mereka dalam pandangan masyarakat.
 - b. Ketidakkakapan khalifah dalam memimpin dan kecenderungan hidup mewah.
2. Konflik eksternal
 - a. Perang saudara antara Arab Utara dan Arab Selatan yang saling bertentangan dan mendukung kandidat khalifah masing-masing. Hal ini memicu timbulnya perang yang lebih besar.

- b. Pemberontakan Kaum Mawali. Kaum Mawali adalah orang non Arab yang baru masuk Islam. Alasan yang menjadi latar belakang pemberontakan mereka adalah karena adanya diskriminasi. Mereka dipandang rendah secara sosial, tidak diberi peluang untuk memegang jabatan tinggi, dan tetap diharuskan membayar jizyah walaupun sudah masuk agama Islam.
- c. Revolusi Abbasiyah yang dipicu ketidakpuasan masyarakat atas pemerintahan khalifah Bani Umayyah sehingga dimanfaatkan oleh kalangan Abbasiyah untuk melakukan pemberontakan.

Pada akhirnya, khalifah Marwan II berhasil dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam Pertempuran Zab. Hal tersebut terjadi pada tahun 750 M dan menandai runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Sementara salah satu keturunan Umayyah yaitu Abdurrahman ad-Dakhil berhasil melarikan diri. Ia kemudian membangun kembali kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol) yang kemudian dikenal sebagai masa Umayyah II.

Jika dibandingkan dengan keilmuan lainnya, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu

menonjol. Namun terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam diantaranya adalah perbaikan konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah serta kehadiran kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf pada masa pemerintahan khalifah Hasyim (Indasari, 2017).

Konsep Perkembangan Ekonomi Pada Era Industri 5.0

Sebelum berkembangnya era ekonomi industri 5.0 saat ini, revolusi industri 4.0 telah membawa dampak perubahan yang sangat besar di masyarakat. Secara umum, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya otomasi penuh, proses digitalisasi dan penggunaan elektronik, serta sistem informasi (Rafsanjani & Irama, 2022). Dimana hal tersebut adalah kombinasi teknologi yang mengurangi atau menghilangkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis.

Kemajuan teknologi tersebut berdampak pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Revolusi secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja, dan cara berhubungan satu sama lain. Semua kepentingan, masyarakat, akademisi, berbagai sektor publik dan swasta harus merespon perubahan tersebut secara terpadu dan komprehensif (Prasetyo, 2019).

Era revolusi industri 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menitik beratkan perkembangan pada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi. Konsep industri 5.0 ini muncul sebagai penyempurnaan dari revolusi industri 4.0 untuk mensinergikan antara manusia dan teknologi (Rafsanjani & Irama, 2022). Visi industri 5.0 pertama kali diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 2017 dalam pameran CeBIT Jerman.

Berbeda dengan industri 4.0 yang menggaungkan wacana bahwa manusia bisa digantikan oleh *Artificial Intellegent* (AI), industri 5.0 sebaliknya justru mengkombinasikan antara keduanya. Dengan kata lain, konsep yang diusung oleh industri 5.0 adalah rehumanisasi yang menganggap manusia sebagai sumber daya utama. Sementara kecerdasan teknologi merupakan upaya untuk membantu manusia menciptakan peluang dari setiap aspek kehidupan. Manusia terbantu dengan data dari internet yang kemudian dapat diolah sebagai bahan untuk menciptakan peluang.

Kecerdasan teknologi di era industri 5.0 mengutamakan aspek manusia. Aspek inilah yang akan mengubah jutaan data internet untuk kehidupan menuju tatanan baru. Keseimbangan antara masalah ekonomi dan sosial perlu ditekankan di era masyarakat 5.0 untuk membantu

manusia menuju kehidupan yang bermakna. Konsep ekonomi 5.0 ini dapat menciptakan masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi dan menikmati hidup serta menyelesaikan permasalahan dari revolusi industri 4.0 yang mulai menurunkan peran manusia (Rafsanjani & Irama, 2022).

Keterampilan dalam mengakses informasi, media, dan kecakapan teknologi adalah yang paling penting untuk dimiliki masyarakat Indonesia untuk menghadapi industri 5.0 (Maria Dimova & Stirk, 2019). Secara lebih rinci, Berdasarkan *World Economic Forum* (WEF) 2020, terdapat 10 kemampuan utama yang dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 yaitu mampu memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, memiliki *human management skill*, mampu berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan untuk menilai dan membuat keputusan, berorientasi layanan, keterampilan negosiasi, dan fleksibilitas kognitif (Saputra et al., 2023).

Sistem industri 5.0 dianggap dapat menciptakan produktivitas yang lebih tinggi serta dapat mengurangi biaya dan waktu. Beberapa manfaat dari integrasi manusia dan teknologi dalam industri 5.0 antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas
Penggunaan teknologi yang semakin canggih sebagai perangkat kerja

memungkinkan tercapainya tingkat produktivitas yang lebih baik. Biaya dan waktu bisa diminimalisir sehingga menciptakan peluang untuk memproduksi jenis barang lain atau jenis barang yang sama dalam kuantitas yang lebih besar. Lebih lanjut, meningkatnya produktivitas dapat membantu masyarakat sehingga mereka memiliki banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin beragam. Dengan demikian hal tersebut secara tidak langsung juga dapat meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat.

2. Meningkatkan efisiensi kerja

Otomatisasi proses melalui penggunaan teknologi dapat meringankan beban kerja karyawan dan mengurangi terjadinya pengulangan kerja. Karyawan bisa lebih fokus melakukan pekerjaan strategis.

3. Meningkatnya kualitas produk dan pelayanan

Pemanfaatan teknologi dengan peran manusia sebagai pemegang kontrol dapat mendorong kepuasan konsumen yang lebih tinggi. Kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik akan menciptakan loyalitas pelanggan. Dengan demikian posisi industri akan lebih kuat di pasar.

4. Mendorong lingkungan usaha yang semakin kompetitif

Era industri 5.0 memungkinkan semakin luasnya keterbukaan informasi bisnis. Semakin banyak pilihan yang tersedia untuk masyarakat, maka semakin ketat pula persaingan antar usaha. Lingkungan usaha yang semakin kompetitif mendorong para pelaku usaha untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan agar tidak tertinggal atau kalah bersaing.

5. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia

Hadirnya revolusi industri 5.0 dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang turut menjadi tantangan bagi sumber daya manusia agar terus meningkatkan *skill*. Pada industri 5.0, teknologi hanya dimanfaatkan sebagai sarana. Sementara pelaku utamanya tetap manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki juga harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan dan selalu adaptif terhadap perubahan.

Meski begitu, perubahan menuju era revolusi industri 5.0 bukan tidak memiliki tantangan. Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam implementasi industri 5.0 (Industri et al., 2023).

1. Infrastruktur digital yang kuat dengan konektivitas memadai di seluruh Indonesia.
2. Keterampilan tenaga kerja.

3. Regulasi dan kebijakan yang kondusif.

Adanya revolusi industri 5.0 bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi pelaku ekonomi. Berbagai sumber menyatakan bahwa konsep ekonomi yang harus diterapkan dalam menghadapi era industri 5.0 adalah ekonomi digital kreatif. Ekonomi digital kreatif merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta memberikan unsur kreatif pada hasil produknya baik berupa barang maupun jasa (Yulastri et al., 2023).

Meski begitu, aspek terpenting yang tetap harus menjadi sasaran pembangunan utama adalah sumber daya manusia (SDM). Ekonomi digital kreatif membutuhkan SDM yang unggul dan cakap teknologi sebagai *user*nya. Terdapat setidaknya tiga hal yang menjadi orientasi dari pembangunan SDM yang unggul yaitu (Qustolani & Kurnadi, 2023):

1. Pemanfaatan teknologi secara bijak.
2. Hasil yang efektif dan efisien.
3. Pelaku ekonomi dengan 4C (*Creativity, Critical thinking, Communication dan Collaboration*).

Relasi Konsep Ekonomi Islam Masa Bani Umayyah Dengan Ekonomi Era Industri 5.0

Munculnya gagasan tentang industri 5.0 turut menjadi tantangan bagi

sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang sarat dengan nilai-nilai dan prinsip agama ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan sehingga akan teruji sebagai sistem ekonomi yang *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini bukan perkara yang mudah di tengah banyaknya paradigma yang masih diwarnai sekularisasi antara sistem ekonomi dan agama. Peleburan sekat antara sistem ekonomi dan agama justru sering dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan ekonomi itu sendiri.

Banyak yang beranggapan bahwa sistem ekonomi menjadi tidak leluasa berkembang dengan adanya batasan-batasan yang ditentukan agama. Namun pandangan tersebut bisa dibantah dengan tinjauan sejarah. Sistem ekonomi Islam pada hakikatnya sudah jauh diterapkan pada masa lalu yaitu mulai masa Rasulullah hingga masa kerajaan Islam seperti Dinasti Bani Umayyah.

Mereka sudah mengadopsi nilai-nilai agama dalam menjalankan perekonomian. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa dengan sistem ekonomi berbasis Islam yang diterapkan, mereka mampu mencapai masa kejayaan. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam bukan sebuah sistem ekonomi yang dapat membawa pada keterbatasan dan ketertinggalan.

Salah satu contoh yang cukup signifikan adalah keberhasilan pada

masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perekonomian saat itu sudah sangat maju dan kehidupan masyarakatnya sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan penghapusan kewajiban pajak jizyah dan bahkan tidak ditemukan lagi rakyat yang tergolong berhak menerima zakat. Konsep *welfare state* yang diusung oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat diadopsi pada masa sekarang. Dalam konsep *welfare state*, pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi semua warga negaranya.

Terdapat tiga prinsip dasar dalam konsep *welfare state*, yaitu:

1. *Equality of opportunity* atau persamaan kesempatan
2. *Equitable distribution of wealth* atau pemerataan pendapatan
3. *Public responsibility* atau tanggung jawab publik terhadap masyarakat yang tidak mampu menyediakan sendiri kebutuhan minimum hidup layak

Dalam konteks menghadapi revolusi industri 5.0 juga perlu penerapan konsep *welfare state*. Pemerintah harus memberikan jaminan adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Termasuk pula menyediakan seperangkat aturan dan hukum yang sehat sebagai kontrol agar tidak terjadi tindak kecurangan yang merugikan. Bagaimana pun juga,

industri 5.0 yang sarat dengan penggunaan teknologi canggih dan digitalisasi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan.

Jika dikaitkan dengan sistem ekonomi Islam, adaptasi teknologi juga harus diimbangi dengan penerapan etika bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariah. Integrasi teknologi dan manusia dalam industri 5.0 akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusianya memiliki etika dan moral yang baik pula sebagai *user* dari teknologi itu sendiri. Sistem ekonomi Islam melarang transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Faktanya, tidak semua orang dapat beradaptasi dengan mengikuti perkembangan industri 5.0 dengan mudah. Tidak semua pelaku usaha dapat menerapkan pemanfaatan teknologi karena keterbatasan biaya modal dan *skill* yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi tertinggal karena adanya revolusi 5.0.

Pemanfaatan teknologi yang canggih akan memudahkan para pelaku usaha yang memiliki modal untuk meraup keuntungan lebih besar.

Terkadang persaingan semacam ini dapat mematikan pasar bagi pelaku usaha lain yang tidak mampu mengikuti perkembangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa pasar-pasar akan dikuasai oleh pemodal besar sehingga pelaku usaha kecil bisa menutup usahanya dan kehilangan sumber pendapatan.

Di sinilah peran pemerintah diperlukan tidak hanya untuk melindungi pelaku usaha kecil tapi juga mendorong mereka agar bisa mengikuti perkembangan. Hal yang bisa dilakukan misalnya dengan memberikan kemudahan akses permodalan dan memberikan pelatihan bisnis digital sehingga mereka memiliki daya saing. Dengan demikian, pemerintah ikut andil dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkeadilan.

Konsep pemerataan pendapatan memiliki korelasi yang erat dengan prinsip ekonomi Islam terkait harta dan kepemilikan. Ekonomi Islam tidak menghendaki menumpuknya kekayaan pada segelintir orang saja. Bahkan sistem ini juga mengajarkan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan dengan berbagi. Termasuk juga aplikasinya melalui bantuan-bantuan sosial pemerintah.

Tugas pemerintah lainnya yang tidak kalah penting adalah mewujudkan tanggung jawab publik. Kemunculan revolusi industri 5.0 tidak hanya

kemudahan bagi sebagian pihak, tapi juga dapat membawa dampak negatif bagi sebagian pihak yang lain. Pemerintah harus sigap dan tanggap dalam mengakomodir pihak-pihak yang mungkin terkena dampak negatif dari revolusi industri 5.0.

Meskipun mencetuskan gagasan tentang integrasi antara manusia dan teknologi, namun tak dapat dipungkiri bahwa kombinasi dalam hal tersebut akan didominasi oleh teknologi. Sementara porsi tenaga manusia hanya akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk mengoperasikannya. Hal ini tetap bisa memicu problem klasik seperti pemutusan hubungan kerja karena tenaga yang sudah tidak dibutuhkan atau kompetensi yang sudah tidak sesuai. Bagaimana pun juga revolusi industri 5.0 membawa tantangan berupa standar yang lebih tinggi dan tidak semua pekerja dapat menyesuaikan diri.

Seseorang masih punya peluang untuk kehilangan pekerjaan seiring pergeseran era industri 4.0 menjadi industri 5.0. Terlebih lagi masalah kurangnya kecakapan teknologi dan ketimpangan literasi digital di Indonesia masih menjadi problem yang belum cukup teratasi. Ada banyak pelaku usaha kecil yang belum bisa beradaptasi dengan era industri 4.0 dan mungkin akan mengalami tekanan lebih besar untuk beralih pada industri 5.0.

Selain mengupayakan pemerataan kesempatan dan pendapatan, langkah terakhir pemerintah dalam memenuhi *welfare state* adalah dengan melaksanakan tanggung jawab publik. Pemerintah harus menunjukkan peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar berdampak dan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan minimum untuk standar hidup yang layak.

Jika ditinjau dari sisi ekonomi Islam, konsep *welfare state* sejalan dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari sebagaimana berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam hal ekonomi.

Sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah. Hal serupa juga bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 5.0. Kemudahan fasilitas teknologi yang menjadi ciri khas industri 5.0 memiliki kesamaan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur pada masa Dinasti Bani Umayyah.

Meski perkembangan teknologi sudah maju tapi tetap menitik beratkan kepada manusia sebagai pelakunya. Sementara teknologi tersebut hanya sebagai sarana. Hal yang lebih penting terletak pada pembangunan karakter dari sumber daya manusia sehingga menjadi pelaku ekonomi yang beretika. Semua fasilitas yang dibangun pada masa Dinasti Umayyah ditujukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Demikian pula selayaknya kehadiran revolusi industri 5.0 juga diarahkan seoptimal mungkin untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Gagasan revolusi industri 5.0 yang sudah banyak digaungkan di berbagai negara tentu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Termasuk pula menjadi tantangan bagi sistem ekonomi Islam agar bisa menyesuaikan dengan perubahan yang mungkin akan terjadi. Sistem ekonomi Islam yang berbasis

pada nilai-nilai agama seringkali masih dianggap sebagai sistem ekonomi yang kaku karena terikat dengan doktrin agama. Padahal hakikatnya sistem ekonomi Islam sudah lebih awal mengantarkan pada masa kejayaan umat. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Khususnya pada masa kekuasaan dua khalifah paling berpengaruh yaitu Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Konsep *welfare state* yang diterapkan pada masa itu dapat diaplikasikan juga untuk menghadapi tantangan revolusi industri 5.0 pada masa kini dengan menitikberatkan pada tiga prinsip dasar yaitu persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan, dan tanggung jawab publik.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas terkait perbandingan konsep pembangunan ekonomi pada masa Bani Umayyah dan khalifah lainnya dengan industri 5.0. Demikian pula penelitian selanjutnya bisa mengkomparasikan dengan zaman kekuasaan Daulah Islamiyah yang lain seperti Dinasti Bani Abbasiyah, Turki Utsmani dan sebagainya sehingga telaah kritis yang didapatkan bisa lebih luas. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dengan mengkorelasikan kebijakan-kebijakan pada masa kejayaan Islam dengan kondisi ekonomi yang dihadapi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Saprida, M H I. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Prenada Media, 2021.

Jurnal :

Effendi, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147–158.

Fajar, D. A. (2021). Kajian Perbedaan time value of money Atau economic value of time dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435–1440.

Ghozali, M. (2019). Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah. *Laa Maisyir*, 6(2), 283–296.

Hariyanti, E., & Mawardi, K. (2023). Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pemerintahan Masa Dinasti Umayyah. *Journal on Education*, 6(1), 1762–1773. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3147>

Humaira, S., Salma, S., & Rusyana, A. Y. (2023). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. 7–14.

- Indasari, D. (2017). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni*, 9(2), 55–60.
- Industri, P., Perekonomian, T., & Nugroho, T. A. (2023). "Perkembangan Industri 5.0 Terhadap Perekonomian Indonesia." 1(3).
- Klasik, B. U. (2021). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM ERA KLASIK (BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH).
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). PERAN E-COMMERCE DALAM KEWIRAUSAHAAN DI ERA SOCIETY 5.0. 4(1), 9–25.
- Muhammad Haris Hidayatulloh, K. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Abbasiyah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 6(1), 348–359.
- Prasetyo, W. (2019). *Society 5.0 Milenial Generation: Digital Talents Formula of Global Open Government and Smart Cities*.
- Qustolani, A., & Kurnadi, E. (2023). Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul (Recovery Ekonomi Pasca Pandemi Menuju Era 5 . 0). 1(12), 1739–1744.
- Rafsanjani, A. Z., & Irama, Y. (2022). Islam dan Society 5.0: Pembacaan Ulang Teologi Islam Perspektif Mohammed Arkoun di Era Digital. KACA (Karunia Cahaya Allah): *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 12(2), 225–243.
- Rinawati, I., & Basuki, H. (2020). Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan Ma Mannan, M. Umar Chapra. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 21–36.
- Rofiqo, A., & Rizal, F. (2019). Kebijakan Ekonomi pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan Gubernur Nasar bin Sayyar pada Masa Khalifah Marwan II 744–750 Masehi). *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 226–236.
- Saputra, M. H., Fitriaty, Firmasari, P., Fadhilah, Y., R, M., & Hassandi, I. (2023). Peluang Dan Tantangan Pasca Covid-19 Mencapai Kinerja Berkelanjutan. *JUMANAGE: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 2, (1) 146–151.
- Setiawan, M. H. (2020). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi

Lainya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 78–98.

Suherli, I. R., Al-hakim, S., Fanhas, E., & Khomaeny, F. (2023). Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam : Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6, (1) 148–158.

Yulastri, A., Tri, D., & Yanto, P. (2023). Profil Entrepreneur Era Digital dalam Menghadapi Society 5 . *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, 0. 9(1), 139–146.

Zainudin, E. (2015). Perkembangan Islam pada Masa Bani Umayyah. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 28–35.

Zuchroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1329–1334.